

**ANALISIS KOMPARASI EVALUATIF ATAS PROGRAM BANTUAN
PANGAN DI DESA SOJOMERTO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN
KENDAL**

Oleh:

Nurhayati, Drs. R. Slamet Santoso, M.Si
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedart, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id> Email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang besar bagi negara – negara berkembang terutama di negara Indonesia. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan. Di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kendal telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal. Bentuk dari kebijakan tersebut yaitu program bantuan pangan (Rastra dan BPNT). Program BPNT ada untuk menggantikan program Rastra. Hal ini yang menjadi ide utama untuk melakukan perbandingan antara program Rastra dengan program BPNT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal pada program Rastra dan BPNT. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kinerja dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sojomerto. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Peneliti merekomendasikan kepada pemerintah untuk program BPNT, seharusnya tidak meninggalkan hal baik dari program Rastra yaitu jumlah beras yang diberikan kepada KPM. Pada program Rastra, Keluarga Penerima Manfaat menerima beras 15 kg. Sedangkan program BPNT, beras yang diberikan sebanyak 10 kg dan ¼ kg telur. Pemerintah seharusnya tidak mengurangi jumlah beras yang diberikan tersebut. Dengan demikian, Keluarga Penerima Manfaat akan merasa beras yang diberikan itu akan cukup, apalagi dengan adanya penambahan telur sebanyak ¼ kg.

Kata kunci : Perbandingan, Rastra, BPNT, Kriteria evaluasi kebijakan

**ANALYSIS OF EVALUATIVE COMPARISON OF THE FOOD AID
PROGRAMS IN SOJOMERTO VILLAGE, GEMUH SUB-
DISTRICT, KENDAL DISTRICT**

ABSTRACT

Poverty is significant issue for developing countries especially in Indonesia. One of poverty prevention effort in Indonesia is issuing a policy. In Central Java, especially in Kendal Regency, Kendal Regency Regional Government Number 4 year 2011 Concerning Poverty Prevention in Kendal Regency have been issued. This policy manifested in the Food Aid Programs (Rastra and Non-Cash Food Support / BPNT). BPNT Program exist to substitute Rastra Program. These become primary idea to conduct comparison between Rastra Program with BPNT Program. This research aimed to analyse performance difference in poverty prevention in Sojomerto Village of Gemuh Sub-district of Kendal Regency on Rastra and BPNT Pograms. This research used quantitative method with comparative research type. Research result showed performance difference on poverty prevention in Sojomerto Village. Such difference could be viewed from policy evaluation criteria of William N. Dunn specifically effectiveness, efficiency, sufficiency, equity, responsiveness and accuracy. Researcher recommended to government the following for BPNT Program, proposed not to receive anything good from the Rastra program, namely the amount of rice given to KPM. In the Rastra program, Beneficiary Families receive 15 kg of rice. While the BPNT program, rice is given as much as 10 kg and ¼ kg of eggs. The goverment does not reduce the amount of rice given. Thus, the Beneficiary Families will recieve the given rice will be sufficient, given by representing eggs as much us ¼ kg.

Keywords: Comparison, Rastra, BPNT, Policy evaluation criteria

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang besar bagi negara – negara berkembang terutama di negara Indonesia. Kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan papan.

Kemiskinan bukan hanya ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan untuk memenuhi hak – hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara layak. Hak – hak dasar tersebut meliputi, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari tindak kekerasan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Apabila terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak – hak tersebut maka sudah menjadi kewajiban negara untuk membantu dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia harus segera diatasi karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, karena melihat banyaknya daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, salah satunya di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah tabel kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2017-2018.

Tabel 1. Data Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018

Keterangan	Data Kemiskinan	
	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin	106.070	94.700
Persentase Penduduk Miskin	11,10	9,84

Sumber: BPS Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Kendal termasuk daerah yang tingkat kemiskinannya bisa dibilang masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal penduduk miskin di Kabupaten Kendal pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 mencapai 11,10 % dan pada tahun 2018 menjadi 9,84 %.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kendal mempunyai pegangan kebijakan Perturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal.

Bantuan Pangan merupakan bentuk bantuan sosial. Bantuan Pangan ini sebagai program bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin merupakan program yang diharapkan masyarakat miskin untuk

mengurangi beban hidup mereka sebagai pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Selain itu, bantuan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga miskin di Kabupaten Kendal, maka pemerintah melakukan program bantuan pangan ini dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin atau biasa disebut dengan RTM. Program pangan ini dimaksudkan agar dapat mengurangi beban dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Kebijakan program Bantuan Pangan pada dasarnya merupakan program bantuan untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, yang mana pada tahun 2016 adalah Raskin, pada tahun 2017 adalah Rastra dan pada tahun 2018 adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program Rastra adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah (Pedoman Umum Subsidi Rastra Tahun 2017). Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli

bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-Warong* yang bekerjasama dengan Bank Penyalur (Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018).

Kedua program diatas merupakan program yang berbeda, walaupun program BPNT merupakan pembaruan dari program Rastra.

Di Kabupaten Kendal ini, yang menjadi lokus penelitian adalah di Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh, yang merupakan jumlah penduduk dan jumlah penerima bantuan tersebut paling banyak di bandingkan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Sojomerto dan Kecamatan Gemuh Tahun 2017-2018

Tahun	Jumlah penduduk Kec. Gemuh	Jumlah Penduduk Desa Sojomerto
2017	50.041	5.787
2018	49.936	5.924

Sumber: Kecamatan dalam Angka

Pada tabel 2, dapat terlihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Gemuh pada tahun 2017 sebanyak 50.492 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Gemuh menurun, yaitu menjadi 49.936 jiwa. Dan untuk jumlah penduduk di Desa Sojomerto sendiri pada tahun 2017 yaitu sebanyak 5.787 dan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 5.924 jiwa.

Masyarakat berharap dengan adanya program Bantuan Pangan ini dapat memberikan keringanan beban dalam pemenuhan kebutuhan pangan terhadap keluarga miskin, yang mana yang menjadi acuan atau parameternya yaitu dalam penyaluran program Bantuan Pangan dapat berjalan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas untuk masyarakat miskin.

Pada program Rastra dan program BPNT dapat dilihat perbedaan sebagai berikut:

Program Rastra

- Sistem penyaluran dilakukan oleh Bulog kepada RTS-PM melalui titik distribusi (RT/RW) setempat
- Program merupakan bantuan subsidi beras
- RTS-PM membayar beras dengan harga Rp 1.600;/kg dan setiap RTS-PM menerima 15kg setiap bulannya

Program BPNT

- Sistem penyaluran dilakukan oleh pihak bank (Himpunan Bank Milik Negara/ Himbara) yang bekerjasama dengan Dinas Sosial
- Program merupakan bantuan beras dan/atau telur yang dapat diambil di agen-agen penyalur atau *E-warong* KPM mendapat uang non tunai sebesar Rp 110.000; didalam rekening setiap bulan.

Dua program bantuan diatas merupakan program yang berbeda, oleh karena itu untuk dapat menilai

kedua kinerja dalam pelaksanaan program tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai program Bantuan Pangan yaitu mengenai Program Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan antara kedua program berupa keunggulan atau kelemahan. Keunggulan program yang ditemukan akan digunakan untuk sumber perbaikan atau penyempurnaan program yang akan datang.

Untuk dapat membedakan program mana yang lebih baik untuk diterapkan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya di Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal peneliti mengambil judul “**Analisis Komparasi Evaluatif Atas Program Bantuan Pangan di Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal**”.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja dalam penanggulangan kemiskinan pada Program Bantuan Pangan di Desa Sojomero Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

KAJIAN TEORI

Administrasi Publik

Menurut George J. Gordan, Administrasi dapat dirumuskan

sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta pengadilan (dalam Inu Kencana Syafie, 2006 : 25).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2006:7).

Sedangkan menurut William N. Dunn (1999:132), Kebijakan Publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu,

ditentukanlah ukuran – ukuran atau kriteria – kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat *bias* dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn 1994, (Dalam Subarsono, 2015 : 126) mencakup 6 indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai

hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

2. Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan

Kecakupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan

Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan

atas dasar kriteria pemerataan atau kesamaan.

5. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kuantitatif dengan tipe Komparatif.

Populasi dan Sampel

Sasaran pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Sojomerto yang menerima program Rastra dan program BPNT.

Populasi pada penelitian ini adalah semua masyarakat penerima program Rastra dan program BPNT yaitu 753 orang. Orang.

Untuk menentukan besarnya jumlah sampel yang digunakan, dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin (Husein Umar, 2002: 146).

$$= \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e^2 : person kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (standar kesalahannya), yaitu 10% (0,1).

Sampel :

$$N = 753/1+753(0,1)^2 = 89$$

Berdasarkan perhitungan sampel di atas, maka dapat ditentukan hasil responden untuk penelitian ini sebanyak 89 orang penerima program Rastra dan program BPNT. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih responden yang menjadi penerima program Rastra dan program BPNT.

Teknik Analisis

Menurut Patton (1980) dalam Jamaluddin Ahmad (2015 : 173) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam

suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan angka-angka dan dikelompokkan dalam kategori tertentu atau dalam bentuk statistik.

Untuk pengujian perbedaan dua sampel yaitu dengan menggunakan rumus *Mann-Whitney U-Test* (dalam Sugiyono, 2016: 153). Metode *Mann-Whitney U-Test* digunakan untuk menguji dua perbedaan median dari dua sampel yang diambil secara independent, sampel-sampel random tersebut bisa diperoleh dari populasi-populasi yang berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$U_1 = n_1n_2 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} - R_1$$

dan,

$$U_2 = n_1n_2 + \frac{n_2(n_2 + 1)}{2} - R_2$$

Keterangan :

n_1 = jumlah sampel 1

n_2 = jumlah sampel 2

U_1 = jumlah peringkat 1

U_2 = jumlah peringkat 2

R_1 = jumlah rangking pada sampel 1

R_2 = jumlah rangking pada sampel 2

Kedua rumus tersebut digunakan dalam perhitungan, karena akan digunakan untuk mengetahui harga U mana yang lebih kecil. Harga U

yang lebih kecil tersebut yang digunakan untuk pengujian dan membandingkan dengan U tabel.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil responden dari sejumlah populasi yang sudah ditentukan. Secara keseluruhan, populasi berjumlah 753 orang yang selanjutnya diambil sampel sebanyak 89 orang atau responden.

Untuk keperluan analisis statistik, dalam penelitian ini diperlukan kuesioner yang disebar kepada responden dengan cara *purposive sampling*. Hasil dari penelitian tersebut dapat dilihat dari analisis yang akan disajikan dalam bahasan berikut, yaitu dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn.

1. Efektivitas

Dalam program Rastra dan program BPNT memiliki tingkat keefektifan yang berbeda. Dalam program Rastra responden menilai kurang baik yaitu dengan persentase sebesar 69,99%. Sedangkan untuk program BPNT dinilai baik dengan persentase sebesar 71,59% dan sangat baik dengan persentase sebesar 28,41%.

Pertama, dalam program Rastra dinilai kurang baik, yaitu proses penyaluran atau pendistribusian beras masih melalui banyak tangan, yaitu

harus menunggu sampai di titik distribusi terakhir, dalam hal ini yaitu di rumah Ketua RT. Sedangkan untuk program BPNT dinilai sudah baik karena dalam penyaluran dapat diambil secara langsung di warung yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.

Kedua, dalam program Rastra tingkat ketercapaian tujuan yang dilakukan pemerintah dalam program kurang baik karena usaha yang dilakukan pemerintah kurang maksimal. Sedangkan untuk program BPNT dinilai sudah baik karena usaha yang dilakukan pemerintah sudah baik.

Ketiga, dalam program Rastra proses pelaksanaan program kurang baik karena dalam pelaksanaannya kurang efektif yakni masih banyak melalui tangan. Sedangkan untuk program BPNT dinilai sudah baik karena dalam prosesnya tidak ribet atau berbelit seperti program Rastra.

Keempat, dalam program Rastra tingkat efektivitas pelaksanaan program kurang baik karena dalam melakukan proses masih berbelit dan masih melalui banyak tangan. Sedangkan untuk program BPNT dinilai sudah baik karena dalam pelaksanaan program lebih efektif dan prosesnya cepat dibandingkan dengan program Rastra.

Kelima, dalam program Rastra strategi pelaksanaan dan pengembangan kebijakan program

kurang baik karena dalam pelaksanaan program tidak terjadi perkembangan yang signifikan selama program berjalan. Sedangkan untuk program BPNT dinilai sudah baik karena dalam program BPNT mampu menunjukkan hasil yang berbeda dengan cara merubah sasaran penerima program, tanpa melihat dari sudut pandang kekeluargaan.

Keenam, dalam program Rastra tingkat kontribusi pemerintah dalam pelaksanaan program kurang baik karena kontribusi pemerintah dalam program Rastra kurang jika dibandingkan dengan program BPNT, yang mana dalam program tersebut pemerintah sangat memperhatikan kontribusi dari pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pendamping dalam proses pelaksanaan program.

Ketujuh, dalam program Rastra pelaksana melakukan tugasnya kurang baik karena petugas kurang berkontribusi penuh dalam proses pelaksanaan program. Berbeda dengan program BPNT yang selalu didampingi oleh petugas saat program berlangsung, sehingga dalam program BPNT ini dinilai sudah baik oleh responden.

2. Efisiensi

Pada kriteria efisiensi dalam program Rastra dan program BPNT memiliki perbedaan

menurut responden. Dalam program Rastra dinilai kurang baik dengan persentase sebesar 53,20%. Sedangkan untuk program BPNT dinilai baik dengan persentase sebesar 80,53%.

Pertama, dalam program Rastra sumber daya manusia yang ikut dalam pelaksanaan program kurang baik karena tidak ada petugas yang benar-benar berperan penting dalam proses pelaksanaan program. Sedangkan untuk program BPNT dinilai sudah baik karena dalam proses pelaksanaannya ada sumber daya manusia yang sangat berperan penting, yaitu pendamping.

Kedua, dalam program Rastra dan program BPNT tingkat sumber dana pemerintah dalam pelaksanaan program dinilai sudah baik oleh responden, karena menurut responden pemerintah sudah tepat menggunakan dananya untuk bantuan beras miskin kepada masyarakat yang kurang mampu, selain itu masyarakat juga merasa bersyukur dengan adanya bantuan program tersebut.

Ketiga, dalam program Rastra kecepatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal kurang baik karena masyarakat tidak melihat adanya kecepatan bekerja dari pemerintah. Sedangkan untuk program BPNT dinilai sudah baik.

3. Kecukupan

Pada kriteria Kecukupan dalam Program Rastra dan Program BPNT menunjukkan bahwa diantara kedua program tersebut terdapat perbedaan dilihat dari rekapitulasi data di atas yaitu pada program Rastra terletak pada posisi kurang baik dengan persentase 42,70% dan pada posisi baik dengan persentase 45,78%. Sedangkan untuk program BPNT terletak pada posisi baik dengan persentase 61,25% dan pada posisi sangat baik dengan persentase 26,95%.

Dalam program Rastra kriteria kecukupan dinilai sudah baik yaitu pada tingkat perbaikan dalam memberikan pelayanan program kepada masyarakat, Selanjutnya, tingkat kecukupan dalam pemberian beras dinilai sudah baik karena dalam porsi bantuan yaitu 15 kg per bulan.

Dalam program BPNT kriteria dinilai sudah baik dapat ditunjukkan dari semua indikator/pertanyaan. Tanggapan dan penilaian masyarakat terhadap program yaitu sudah baik karena program berjalan dengan baik sesuai pedoman. Selain itu, beras yang diberikan berkualitas baik, petugas yang menanganai ramah dan membantu mengarahkan masyarakatnya.

Selain itu, sama halnya dengan program Rastra, tingkat perbaikan dalam memberikan

pelayanan program kepada masyarakat. Namun, pada tingkat kecukupan dalam pemberian beras disini Rastra lebih unggul daripada BPNT. Pada program Rastra, beras yang diberikan sebanyak 15 kg sedangkan pada program BPNT hanya 10 kg dan $\frac{1}{4}$ kg telur.

4. Pemerataan

Pada kriteria pemerataan dalam program Rastra dan program BPNT memiliki tingkat perbedaan, yaitu dalam program Rastra responden menilai kriteria tersebut kurang baik dengan persentasi sebesar 56,75%. Sedangkan untuk program BPNT, responden menilai baik dengan persentase sebesar 82,57%.

Pertama, dalam program Rastra pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan kurang baik karena masih adanya unsur kekeluargaan dalam penentuannya. Berbeda dengan program BPNT yang dinilai baik oleh responden.

Kedua, dalam program Rastra tingkat keadilan dalam pemerataan pemberian program dinilai kurang baik karena masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan program tetapi ia tidak mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan untuk program BPNT, dinilai sudah baik karena hal ini berkaitan dengan penentuan

penerima bantuan yang mana dalam program BPNT sudah melalui penyaringan kembali, sehingga dalam tingkat keadilan disini sudah dalam taraf adil atau baik.

Ketiga, dalam program Rastra, kriteria dalam penentuan pemberian program dinilai kurang baik karena dalam penentuannya belum sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk program BPNT, dinilai sudah baik karena dalam program BPNT tersebut sudah melakukan penyaringan, sehingga dapat terpilih secara selektif siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan program.

Keempat, dalam program Rastra tingkat pemerataan dalam pembagian program dinilai kurang baik karena dalam pelaksanaannya belum merata. Masih ada beberapa RW yang tidak memenuhi apa yang sudah ada di dalam pedoman, yaitu dengan mengambil kebijakan sendiri untuk membagi rata beras dengan harapan semua warganya mendapatkan bantuan tersebut. Namun, hal tersebut tidak dibenarkan dalam pedoman karena didalamnya terdapat masyarakat yang seharusnya tidak berhak akan bantuan program. Dengan kebijakan yang diambil tersebut menyebabkan beras yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pedoman.

Berbeda dengan program BPNT yaitu tingkat pemerataan dalam pembagian program sudah baik, beras yang diperoleh sama yaitu sebesar 10kg/bulan per orang.

5. Responsivitas

Pada kriteria responsivitas dalam program Rastra dan program BPNT memiliki tingkat perbedaan. Dalam program Rastra responden menilai kurang baik yaitu dengan persentase sebesar 53,40% dan tidak baik 26,40%.. Sedangkan dalam program BPNT responden menilai baik yaitu dengan persentase sebesar 49,42% dan sangat baik sebesar 10,68%.

Kriteria responsivitas dalam program Rastra dinilai kurang baik dapat yaitu pada tingkat pengaruh kebijakan program dalam kehidupan masyarakat dan tingkat perubahan dalam kehidupan sehari-hari setelah menerima program. Setelah menerima program Rastra tidak ada pengaruh ataupun perubahan dalam kehidupannya, sehingga hal ini yang menjadikan penilaian kurang baik oleh responden terhadap program Rastra.

Sedangkan untuk program BPNT dinilai baik karena respon masyarakat terhadap program baik, yaitu masyarakat merasa senang dengan adanya program tersebut karena dapat meringankan salah satu beban hidupnya yaitu mengenai soal pangan. Selain itu, terkait

pengaruh kebijakan program dalam kehidupan masyarakat juga dinilai baik karena dengan menerima beras yang kualitasnya bagus, dapat memberikan gizi yang baik, serta mendapatkan telur yang secara langsung juga memberikan protein kepada masyarakat. Dan yang terakhir terkait tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima program. Dalam program BPNT, masyarakat merasa puas dengan program tersebut, dengan memperoleh beras sebesar 10 kg/bulan dan dengan kualitas yang bagus, serta telur sebanyak $\frac{1}{4}$ kg yang sesuai dengan apa yang ada dalam pedoman.

6. Ketepatan

Pada kriteria ketepatan dalam program Rastra dan program BPNT memiliki perbedaan. Hal ini ditunjukkan dalam program Rastra, responden menilai kurang baik yaitu dengan persentase sebesar 57,18% dan tidak baik sebesar 25,07%.. Berbeda dengan program BPNT yang dinilai baik oleh responden yaitu dengan persentase sebesar 64,39% dan sangat baik sebesar 29,44%.

Yang menjadi fokus penilaian kurang baik kriteria ketepatan dalam program Rastra yaitu pertama tingkat ketepatan kebijakan dalam program. Program Rastra belum berjalan sesuai dengan apa yang ada dalam pedoman. Kedua, pemerintah

dalam menentukan sasaran penerima program kurang baik karena masih adanya unsur kekeluargaan, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Ketiga, tingkat ketepatan sasaran dalam program kurang baik karena hal ini bersangkutan dengan indikator penentuan sasaran yang mana dalam program Rastra ini dalam menentukan sasaran kurang baik pula. Keempat, tingkat ketepatan target kurang baik karena walaupun kuota yang diberikan banyak, dan sesuai dengan jumlah, tetapi tidak tepat sasaran. Kelima, tingkat ketepatan pelaksana dalam menjalankan program kurang baik karena dalam pelaksanaannya tidak ada petugas yang mendampingi. Keenam, tingkat ketepatan waktu dalam pelaksanaan program kurang baik karena, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pedoman, yang seharusnya program dilaksanakan satu bulan sekali, tetapi terkadang dilaksanakannya dua bulan sekali. Ketujuh, tingkat ketepatan harga dalam program kurang baik karena dalam pelaksanaan program masih dikenakan biaya tambahan, yaitu biaya transport sebesar Rp 2.500; per orang yang mana hal tersebut tidak ada dalam pedoman. Kedelapan, tingkat

administrasi dalam pelaksanaan program kurang baik karena dalam pelaksanaan program kurang tertib administrasi, yaitu tidak konsisten dalam hal absensi.

Sedangkan untuk program BPNT, yang menjadi fokus penilaian baik yaitu, pertama tingkat ketepatan kebijakan dalam program karena dalam pelaksanaannya sudah baik dan sesuai dengan pedoman yang ada. Kedua, pemerintah dalam menentukan sasaran penerima program sudah baik karena pemerintah sudah melakukan pendataan ulang dengan survey, sehingga sudah ada perubahan terkait penerimaan bantuan program. Ketiga, tingkat ketepatan sasaran dalam program sudah baik karena indikator ini berkaitan dengan proses penentuan sasaran penerima program, yang mana dalam menentukan sasaran penerima program sudah baik artinya tingkat ketepatan sasaran juga baik. Keempat, tingkat ketepatan target sudah baik karena target yang diberikan sudah sesuai dengan kuota yang ada dan sasaran yang dituju sudah tepat dengan adanya pendataan ulang tadi.

Kemudian yang kelima, tingkat ketepatan jumlah baik karena jumlah yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada dalam pedoman yaitu beras

sebanyak 10 kg dan telur ¼ kg per bulan. Keenam, tingkat ketepatan waktu sudah baik karena sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam pedoman, yaitu mendapatkan bantuan program 1 tahun 12 kali atau 1 bulan sekali. Ketujuh, tingkat ketepatan harga sudah baik karena dalam program BPNT, bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan pedoman, yaitu senilai Rp 110.000; dan hanya boleh ditukarkan dalam bentuk beras dan telur. Dan yang terakhir yaitu tingkat ketepatan administrasi sudah baik karena dalam pelaksanaannya sudah menjalankan proses administrasi dengan baik kepada petugas yang mendampingi.

Hasil Uji Mann-Whitney

Tabel 3.				
Rata – Rata Peringkat Setiap Kelompok				
	Kategori	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Penerima Program	Rastra	89	45,00	4005,00
	BPNT	89	134,00	11926,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai rata-rata pada kelompok sampel Penerima Program Rastra adalah sebesar 45,00, lebih rendah dibandingkan dengan kelompok sampel Penerima Program BPNT yaitu sebesar 134,00. Dengan

demikian, respon pada kelompok sampel Penerima Program BPNT lebih baik dibandingkan dengan Penerima Program Rastra.

Tabel 4.
Signifikansi Perbedaan Setiap Kelompok

Test Statistics ^a	
	Penerima Program
Mann-Whitney U	,000
Wilcoxon W	4005,000
Z	-11,533
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000
a. Grouping Variable: Kategori	

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil pengujian menunjukkan nilai U sebesar 0,000 dan nilai W sebesar 4005. Apabila dikonversikan ke nilai Z, maka besarnya adalah -11,533. Nilai Sig. atau *P Value* sebesar 0,000 < 0,1. Karena nilai p value < batas kritis 0,1 maka terdapat perbedaan bermakna/ signifikan antara kelompok sampel penerima program Rastra dengan penerima program BPNT. Dalam pengujian hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Ada perbedaan kinerja dalam penanggulangan kemiskinan pada program bantuan Pangan di Desa Sojomerto.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari semua kriteria evaluasi kebijakan yang ada, dapat ditarik kesimpulan pada kriteria kecukupan bahwa adanya perbedaan, dimana pada program lama (Rastra) lebih baik dari pada program baru (BPNT). Hal ini dapat ditunjukkan pada indikator tingkat kecukuan beras yang diberikan pada program Rastra yaitu 15 kg dan pada program BPNT yaitu hanya 10 kg dan atau ¼ telur. Dengan demikian, keunggulan atau kelebihan pada program Rastra yang ditemukan, dapat digunakan untuk sumber perbaikan atau penyempurnaan pada program BPNT.

Dengan demikian, adanya perbedaan tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki program yang akan mendatang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis komparasi evaluatif atas program bantuan pangan maka dapat disampaikan beberapa saran baik untuk meningkatkan kinerja program, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pada program Rastra, tingkat kecukupan beras yang diberikan lebih unggul dari pada tingkat kecukupan beras yang diberikan pada program BPNT. Artinya, pada tingkat kecukupan beras tersebut seharusnya digunakan untuk sumber penyempurnaan

program selanjutnya, dalam hal ini yaitu program BPNT.

2. Pada program BPNT, seharusnya tidak meninggalkan hal baik dari program Rastra yaitu jumlah beras yang diberikan kepada KPM. Pada program Rastra, Keluarga Penerima Manfaat menerima beras 15 kg. Sedangkan program BPNT, beras yang diberikan sebanyak 10 kg dan $\frac{1}{4}$ kg telur. Pemerintah seharusnya tidak mengurangi jumlah beras yang diberikan tersebut. Dengan demikian, Keluarga Penerima Manfaat akan merasa beras yang diberikan itu akan cukup, apalagi dengan adanya penambahan telur sebanyak $\frac{1}{4}$ kg.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media
- Dunn, William. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2016. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Kecamatan Gemuh Dalam Angka Tahun 2016
- Kecamatan Gemuh Dalam Angka Tahun 2017
- Kecamatan Gemuh Dalam Angka Tahun 2018
- Pedoman Umum Rastra Tahun 2017
- Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018
- Perda Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Peraturan Menteri Sosial No 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- BPS Kabupaten Kendal, (<https://kendalkab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/110>), (Diakses pada tanggal 26 November 2017 pukul 22.40)
- BPS Kabupaten Kendal (<https://kendalkab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/24>), (Diakses pada tanggal 26 November 2017 pukul 22.44)